ABSTRAK

Disertasi dengan judul "Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil Bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu) ini ditulis oleh Saiful Ali dengan Promotor Prof, Dr. Iffatin Nur, M. Ag. dan Dr. Asmawi, M.Ag.

Kata Kunci: Balig, Adil, Wali Nikah, Reformulasi, Penghulu

Pencatatan pernikahan sebagai bagian integral dari sistem hukum keluarga di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas, mengikat, dan dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk penghulu yang bertanggung jawab langsung dalam penetapan syarat-syarat sah nikah. Pada praktiknya, syarat-syarat menjadi wali nikah, seperti balig, adil, berakal, dan beragama Islam, sering kali diinterpretasikan dengan beragam. Ketidakjelasan parameter syarat balig dan adil, menyebabkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada keabsahan pernikahan. Problem ini menjadi semakin kompleks ketika ditemukan fakta bahwa seorang yang memenuhi kualifikasi balig tetapi belum dewasa atau tidak adil tetap diizinkan untuk menjadi wali nikah, karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk mencabut kewenangan sebagai wali. Persepsi penghulu terhadap kualifikasi wali nikah, berlandaskan pada pemahaman fikih yang belum terformulasikan secara memadai dalam aturan hukum yang lebih aplikatif, memunculkan sebuah pertanyaan mendasar *Mengapa syarat balig dan adil bagi wali nikah perlu direformulasi?* Secara filosofis, pertanyaan ini berkaitan dengan pemahaman tentang kedewasaan dan kecakapan hukum sebagai prasyarat sahnya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam konteks ini adalah pernikahan. Sementara itu, pada tingkat praktis, ketidakjelasan dalam implementasi syarat-syarat tersebut menciptakan ketegangan antara apa yang diharapkan dalam norma hukum dengan apa yang terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif penghulu sebagai aktor utama dalam proses pencatatan nikah.

Tiga pertanyaan dalam disertasi ini adalah: pertama, mengapa perlu dilakukan reformulasi terhadap syarat balig dan adil bagi wali nikah? Kedua, bagaimana persepsi dan implementasi syarat balig dan adil oleh penghulu dalam praktik pencatatan nikah? Ketiga, bagaimana reformulasi kualifikasi balig dan adil bagi wali nikah berbasis kecakapan hukum menurut persepsi penghulu?

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi komparatif, dan dokumentasi. Analisis data

dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif yang memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data empiris dan mendiskusikan peran penghulu dalam menetapkan kualifikasi wali nikah. Pengecekan keabsahan data dilakukan triangulasi, member check dan diskusi dengan teman sejawat yang tergabung dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Bahwa syarat balig dan adil sebagaimana diatur dalam PMA 20 Tahun 2019, PMA 22 Tahun 2024, dan PMA 30 Tahun 2024, yang mengacu pada bahasa fikih, menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan praktisnya. Balig, yang dalam fikih sering diartikan sebagai usia kedewasaan, tidak memiliki definisi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang beragam mengenai kapan seseorang dianggap telah balig. Begitu juga dengan adil, yang sering dipahami sebagai suatu kondisi moral yang sangat subjektif dan sulit diukur secara pasti. Tidak adanya penjelasan yang memadai dalam peraturan ini menimbulkan kebingungan di kalangan penghulu, yang sering kali terpaksa mengabaikan kualifikasi adil, atau bahkan meloloskan individu yang belum memenuhi syarat dewasa untuk menjadi wali nikah. 2) Penelitian menemukan bahwa meskipun penghulu dalam praktiknya mengikuti pedoman fikih dan regulasi untuk menetapkan balig, sering kali mengesampingkan kualifikasi adil karena keterbatasan dalam instrumen dan indikator hukum. Hal ini menggambarkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diatasi dengan reformulasi terhadap kualifikasi tersebut. 3) Konsep reformulasi kualifikasi baligh dan adil persepsi penghulu diawali dengan konsep kecakapan hukum yang harus dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk secara sah melakukan perbuatan hukum yang memerlukan tingkat kedewasaan. Dengan kata lain, seorang wali nikah harus dianggap cakap secara hukum untuk melakukan tindakan tersebut, yang hanya dapat dicapai apabila ia telah mencapai usia kedewasaan (21 tahun) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, konsep adil yang selama ini diterjemahkan secara sempit harus diperluas. Ketidakadilan seorang wali tidak seharusnya serta-merta menghalangi perannya dalam wali nikah, kecuali jika ada keputusan dari Pengadilan yang mencabut hak perwaliannya. Reformulasi ini memberikan dasar yang lebih jelas dan terukur dalam penetapan kualifikasi wali nikah yang sesuai dengan prinsip kecakapan hukum dan lebih mencerminkan pemahaman yang lebih rasional terhadap kedewasaan. Secara filosofis, kedewasaan sebagai syarat hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, bukanlah hal yang bersifat otomatis atau simbolik, melainkan harus dilihat sebagai ukuran dari kecakapan hukum. Batasan usia balig dalam konteks wali nikah harus dilihat sebagai batasan usia di mana seseorang dianggap dewasa secara hukum, yang

tidak hanya berkaitan dengan usia fisik semata, tetapi juga dengan kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Kecakapan hukum ini harus dijadikan sebagai syarat utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi wali nikah, menggantikan ketentuan balig yang selama ini dianggap lebih berbasis pada usia semata.

Proposisi teori baru yang ditawarkan dalam disertasi ini adalah integrasi pemahaman antara konsep kedewasaan hukum dengan kecakapan hukum dalam menentukan kualifikasi wali nikah. Reformulasi kualifikasi wali nikah berbasis kecakapan hukum ini tidak hanya memberikan kejelasan mengenai parameter balig dan adil, tetapi juga menjamin peran wali nikah sebagai pelindung. Sedangkan untuk kualifikasi adil, selama tidak dicabut hak perwaliannya dari Pengadilan. Reformulasi ini tidak hanya menawarkan solusi terhadap problematika implementasi syarat wali nikah, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan hukum.

ABSTRACT

The dissertation with the title "Qualification of Marriage Guardians Based on Legal Skills (Exploring the Concept of Reformulating the Requirements for Balig and Adil for Marriage Guardians Perceptions of Penghulu) was written by Saiful Ali with Promoter Prof, Dr. Iffatin Nur, M. Ag. and Dr. Asmawi, M.Ag.
Keywords: Balig, Adil, Marriage Guardian, Reformulation, Penghulu

Marriage registration as an integral part of the family law system in Indonesia requires a legal framework that is clear, binding and acceptable to various parties, including the penghulu who is directly responsible for determining the conditions for a valid marriage. In practice, the requirements for being a marriage guardian, such as being of age, being adil, being sensible, and being Muslim, are often interpreted in various ways. The lack of clarity regarding the parameters of the conditions for puberty and adil, causes legal uncertainty which has implications for the validity of marriage. This problem becomes even more complex when it is discovered that a person who meets the qualifications for puberty but is immature or fasiq is still permitted to be a marriage guardian, because there is no clear mechanism to revoke authority as guardian. The Penghulu's perception of the qualifications of marriage guardians, based on an understanding of fikih which has not been adequately formulated in more applicable legal regulations, raises a fundamental question. Why do the requirements for puberty and adil for marriage guardians need to be reformulated? Philosophically, this question is related to the understanding of maturity and legal skills as a prerequisite for a person's legality to carry out legal acts, in this context marriage. Meanwhile, at a practical level, the lack of clarity in the implementation of these requirements creates tension between what is expected in legal norms and what happens in practice. Therefore, this research aims to explore the perspective of the penghulu as the main actor in the marriage registration process.

The three questions in this dissertation are: first, why is it necessary to reformulate the requirements for puberty and be adil for marriage guardians? Second, what is the perception and implementation of the requirements for puberty and adil by the penghulu in the practice of registering marriages? Third, how is the reformulation of puberty qualifications and adil for marriage guardians based on legal skills according to the perception of the penghulu?

The research method used in this dissertation is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews,

comparative studies, and documentation. Data analysis was carried out using an inductive approach which allowed the author to identify themes that emerged from the empirical data and discuss the role of the penghulu in determining the qualifications of marriage guardians. Checking the validity of the data was carried out by triangulation, member checks and discussions with colleagues who are members of the Association of Indonesian Penghulu (APRI) Blitar.

The research results show 1) That the requirements for puberty and adil as regulated in PMA 20 of 2019, PMA 22 of 2024, and PMA 30 of 2024, which refer to the language of fikih, create uncertainty in their practical application. Balig, which in fikih is often interpreted as the age of maturity, does not have a strict definition in statutory regulations, which causes various interpretations regarding when a person is considered to have reached maturity. Likewise with adil, which is often understood as a moral condition that is very subjective and difficult to measure with certainty. The absence of adequate explanations in these regulations creates confusion among penghulu, who are often forced to ignore adil qualifications, or even allow individuals who do not yet meet the adult requirements to become marriage guardians. 2) Research finds that although penghulu in practice follows fikih guidelines and regulations for determining puberty, they often exclude adil qualifications due to limitations in legal instruments and indicators. This illustrates that there are gaps in the legal system that need to be addressed by reformulating these qualifications. 3) The concept of reformulating puberty qualifications and adil perception of the penghulu begins with the concept of legal skills which must be understood as a person's ability to legally carry out legal acts that require a level of maturity. In other words, a marriage guardian must be considered legally competent to carry out this action, which can only be achieved if he has reached the age of maturity (21 years) according to the applicable legal provisions. Apart from that, the concept of adil, which has so far been interpreted narrowly, must be expanded. A guardian's fasik should not immediately hinder his role as a marriage guardian, unless there is a decision from the Court that revokes his guardianship rights. This reformulation provides a clearer and more measurable basis for determining the qualifications of marriage guardians which is in accordance with the principle of legal competence and reflects a more rational understanding of maturity. Philosophically, maturity as a legal requirement for carrying out a legal act is not something that is automatic or symbolic, but must be seen as a measure of legal skill. The age limit for puberty in the context of marriage guardians must be seen as the age limit at which a person is considered legally adult, which is not only related to physical age, but also to the ability to take legal responsibility. This legal

competency must be used as the main requirement in determining a person's suitability to become a marriage guardian, replacing the puberty provisions which are currently considered to be based solely on age.

The new theoretical proposition offered in this dissertation is the integration of understanding between the concept of legal maturity and legal skills in determining the qualifications of marriage guardians. This legal proficiency-based reformulation of marriage guardian qualifications not only provides clarity regarding the parameters of puberty and adil, but also guarantees the role of marriage guardians as protectors. As for adil qualifications, as long as the guardianship rights are not revoked by the court. This reformulation not only offers a solution to the problem of implementing marriage guardian requirements, but also opens up space for the development of a legal system that is more responsive to social change and legal developments.

الملخص

الأطروحة التي تحمل عنوان " مؤهلات أولياء الزواج على أساس المهارات القانونية (استكشاف مفهوم إعادة صياغة متطلبات البلوغ والعدالة أولياء الزواج لتصورات PENGHULU)" كتبها Saiful Ali مع الأستاذ المروج Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. dan Dr. H. Asmawi M.Ag.

الكلمات المفتاحية: باليغ، عادل، ولي الزواج، إعادة الصياغة penghulu

يتطلب تسجيل الزواج كجزء لا يتجزأ من نظام قانون الأسرة في إندونيسيا إطارًا قانونيًا واضحًا وملزمًا ومقبولًا لمختلف الأطراف، بما في ذلك penghulu المسؤول بشكل مباشر عن تحديد شروط الزواج الصحيح. ومن الناحية العملية، غالبًا ما يتم تفسير متطلبات الولي على الزواج، مثل السن، والعدالة، والعقلانية، والمسلمة، بطرق مختلفة. إن عدم الوضوح فيما يتعلق بمعايير شروط البلوغ والعدالة، يسبب عدم يقين قانوني له آثار على صحة الزواج. وتصبح هذه المشكلة أكثر تعقيدًا عندما يُكتشف أن الشخص الذي يستوفي مؤهلات البلوغ ولكنه غير ناضج أو غير عادل يظل مسموحًا له أن يكون وليًا للزواج، لأنه لا توجد آلية واضحة لإلغاء سلطة الؤالي. إن تصور penghulu لمؤهلات أولياء الزواج، بناء على فهم فقهي لم تتم صياغته بشكل مناسب في لوائح قانونية أكثر قابلية للتطبيق، يثير سؤالا أساسيا لماذا تحتاج متطلبات البلوغ والعدالة لأولياء الزواج إلى إعادة صياغة؟ ومن الناحية الفلسفية، يرتبط هذا السؤال بفهم النضج والمهارات القانونية كشرط أساسي لشرعية الشخص في القيام بالتصرفات القانونية، وفي هذا السياق الزواج. وفي الوقت نفسه، على المستوى العملي، يؤدي الافتقار إلىi الوضوح في تنفيذ هذه المتطلبات إلى خلق التوتر بين ما هو متوقع في القواعد القانونية وما يحدث في الممارسة العملية. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى استكشاف وجهة نظر penghulu باعتباره الفاعل الرئيسي في عملية تسجيل الزواج.

والأسئلة الثلاثة في هذه الرسالة هي: أولاً، لماذا من الضروري إعادة صياغة متطلبات البلوغ والعدالة لأولياء الزواج؟ ثانياً، ما هو تصور وتنفيذ متطلبات البلوغ والعدالة من قبل penghulu في ممارسة تسجيل الزواج؟ ثالثاً، كيف تكون إعادة صياغة مؤهلات البلوغ ؤالعادلة لأولياء الزواج على أساس المهارات القانونية حسب تصور penghulu؟

طريقة البحث المستخدمة في هذه الرسالة هي المنهج النوعي مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والدراسات المقارنة والتوثيق. ثم إجراء تحليل البيانات باستخدام المنهج الاستقرائي الذي سمح للمؤلف بتحديد المواضيع التي انبثقت من البيانات التجريبية ومناقشة دور penghulu في تحديد مؤهلات أولياء أمور الزواج. ثم التحقق من صحة البيانات عن طريق التثليث وفحوصات الأعضاء والمناقشات مع الزملاء الأعضاء في جمعية Penghulu الإندونيسية ((APRI)بليتار. تظهر نتائج البحث 1) أن متطلبات البلوغ والعدالة المنصوص عليها في مرسوم الضبط PMA nomor 20 tahun 2019، والمرسوم PMA nomor 22 tahun 2024، PMA nomor 30 tahun 2024، والتي تشير إلى لغة الفقه، تخلق حالة من عدم اليقين في تطبيقها العملي. البلؤغ، الذي غالبًا ما يُفسَّر في الفقه على أنه سن البلوغ، ليس له تعريف صارم في اللوائح القانونية، مما يسبب تفسيرات مختلفة فيما يتعلق بالوقت الذي يعتبر فيه الشخص قد وصل إلى مرحلة البلوغ. وبالمثل مع العدالة، التي غالبًا ما تُفهم على أنها حالة أخلاقية ذاتية للغاية ويصعب قياسها على وجه اليقين. إن غياب التفسيرات الكافية في هذه اللوائح يخلق ارتباكًا بين penghulu، الذين غالبًا ما يضطرون إلى تجاهل المؤهلات العدالة، أو حتى السماح للأفراد الذين لم يستوفوا بعد متطلبات الناضجين بأن يصبحوا أولياء على الزواج. 2) وجد البحث من أن penghulu يتبع في الممارسة المبادئ التوجيهية واللوائح الفقهية لتحديد البلوغ، إلا أنه غالبًا ما يستبعد المؤهلات العادلة بسبب القيود في الصكوك والمؤشرات القانونية. وهذا يوضح أن هناك ثغرات في النظام القانوني يجب معالجتها من خلال إعادة صياغة هذه المؤهلات.3) إن مفهوم إعادة صياغة مؤهلات البلوغ ؤ العدالة ل penghulu يبدأ بمفهوم المهارات القانونية التي يجب أن تفهم على أنها قدرة الشخص على القيام قانونياً بالتصرفات القانونية التي تتطلب مستوى من النضج. بمعنى آخر، يجب اعتبار ولي الزواج أهلاً قانونياً للقيام بهذا الإجراء، ولا يتم ذلك إلا إذا بلغ سن الرشد (21 عاماً) وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها. وفضلاً عن ذلك، فإن مفهوم العدالة، الذي تم تفسيره حتى الآن بشكل ضيق، لا بد من توسيعه. ولا يجوز أن يؤدي فسق الولي إلى عرقلة دوره كولي الزواج على الفور، إلا إذا صدر قرار من المحكمة بإسقاط حقوق الولاية عنه. توفر إعادة الصياغة هذه أساسًا أوضح وأكثر قابلية للقياس لتحديد مؤهلات أولياء الزواج، وهو ما يتوافق مع مبدأ الكفاءة القانونية ويعكس فهمًا أكثر عقلانية للنضج. من الناحية الفلسفية، فإن النضج كشرط قانوني لتنفيذ عمل قانوني ليس شيئًا تلقائيًا أو رمزيًا، ولكن يجب أن يُنظر إليه على

أنه مقياس للمهارة القانونية. يجب أن يُنظر إلى الحد العمري للبلوغ في سياق أولياء الزواج على أنه الحد العمري الذي يعتبر فيه الشخص بالغًا من الناحية القانونية، وهو ما لا يتعلق بالعمر الجسدي فحسب، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على تحمل المسؤولية القانونية. ويجب استخدام هذه الأهلية القانونية باعتبارها الشرط الرئيسي في تحديد مدى ملاءمة الشخص ليصبح وليًا للزواج، لتحل محل أحكام البلوغ التي تعتبر حاليًا مستندة إلى السن فقط.

إن الاقتراح النظري الجديد المقدم في هذه الأطروحة هو دمج الفهم بين مفهوم النضج القانوني والمهارات القانونية في تحديد مؤهلات أولياء الزواج. إن إعادة صياغة مؤهلات ولي الزواج على أساس الكفاءة القانونية لا توفر الوضوح فيما يتعلق بمعايير البلوغ والعدالة فحسب، بل تضمن أيضًا دور أولياءالزواج كحماة. أما بالنسبة للمؤهلات العادلة، ما لم يتم إلغاء حقوق الولاية من قبل المحكمة. إن إعادة الصياغة هذه لا تقدم حلاً لمشكلة تنفيذ متطلبات ولي الزواج فحسب، بل تفتح أيضًا مساحة لتطوير نظام قانوني أكثر استجابة للتغير الاجتماعي والتطورات القانونية.